

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Isnaeni, Diyan dan Suratman (2018). *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Lubis, Abdul Rahim dan Muhammad Yamin Lubis (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis (2011), *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rachman, Noer Fauzi (2012). *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Rachman, Noer Fauzi (2017). *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Santoso, Urip (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Syarief, Elza (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

b. Jurnal:

- Febriani, Nathania (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Eigendom Yang Tidak Dikonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/ PDT/2019). *Jurnal Adigama*, 3 (1), 205.
doi: <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8898/5691>
- Fitriana, Gita dan Abdul Mukmin Rehas (2017). Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. *Yurjska Jurnal Ilmiah Hukum*, 9 (2).
doi:
<http://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/224/171>
- Hasanah,Ulfia (2012). Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Univ. Riau*, 3 (1).

- doi:
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1030/1023>
- Karina, Nadya, Ana Siviana, dan Triyono (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013). *Diponogoro Law Review*, 5 (2).
- doi:
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11019/10688>
- Liadi, William Seven (2019). Kedudukan Eigendom Verponding dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. *Panorama Hukum*, 4 (1), 14.
- doi:
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/3884/2360>
- Muhlizar (2020). Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Hadharah*, 12 (1), 90.
- doi:
<https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/Hadharah/article/view/58/44>
- Mu'in, Achmad (2015). Hak Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom Untuk Mendapatkan Hak Setelah Habisnya Waktu Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. *Calyptra*, 4 (1).
- doi:
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1020/819>
- Rachma, Yusnita (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5 (4).
- doi:
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064/2753>

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

- Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1860 Nomor 104.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Nomor 32 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Nomor 2 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah.
- Asal Konversi Hak-Hak Barat. Nomor 3 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

d. Tesis/ Disertasi

- Hendro (2009). Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom Verponding Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK./PDT./2002) Tesis UI.